

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budidaya Perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakkan ikan. Pentingnya usaha budidaya perikanan tidak lepas dari peran penting pemerintah serta orang yang mengelola budidaya tersebut. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan budidaya perikanan yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada calon pemilik budidaya perikanan untuk mendapatkan sertifikat budidaya ikan yang baik. Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah yaitu dalam penentuan untuk merekomendasikan penerima sertifikat yang layak mengembangkan budidaya perikanan dan yang tidak layak untuk mengembangkan budidaya perikanan.

Dalam penentuan untuk merekomendasikan penerima setifikat melalui beberapa proses diantaranya proses penilaian cara budidaya ikan yang baik. Dimana proses penilaian masih mengalami kendala yaitu dalam pengumpulan data yang masih dilakukan dengan cara sederhana dengan membawa kertas panduan cara budidaya ikan yang baik kemudian diisi satu persatu oleh pemilik budidaya perikanan tersebut mengakibatkan proses pengumpulan data memerlukan waktu yang cukup lama sehingga waktu yang diperlukan tidak efisien, masalah berikutnya yaitu tidak adanya sistem informasi tentang cara budidaya ikan yang baik pada sebuah budidaya perikanan sehingga masyarakat sulit mengembangkan budidaya perikanan miliknya karena informasi dari

pemerintah yang kurang serta tidak adanya pemberitahuan tentang ketentuan budidaya ikan yang baik. Masalah lainnya yang juga sering dihadapi oleh pemerintah yaitu proses perhitungan yang masih dilakukan dengan menggunakan perhitungan manual, sehingga mengakibatkan terjadinya inkonsistensi hasil perhitungan karena hasil yang dihitung langsung di lapangan kemungkinan akan berbeda dengan perhitungan yang dihitung di kantor.

Untuk menangani beberapa permasalahan dalam penilaian budidaya perikanan yang layak direkomendasikan mendapat sertifikat budidaya perikanan, maka penulis membuat sebuah sistem informasi penilaian tingkat kelulusan cara budidaya ikan yang baik sehingga masalah pengumpulan data dapat dilakukan dengan mudah dan waktu yang diperlukan dapat lebih efisien, informasi tentang budidaya perikanan yang dihasilkan langsung kepada masyarakat, serta inkonsistensi hasil perhitungan tidak terjadi lagi karena penelitian ini menggunakan metode AHP (*Analitycal Hierarchy Process*). Metode AHP merupakan sebuah model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengusulkan sebuah penelitian dengan judul **“Sistem Informasi Penilaian Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan Menggunakan Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) “.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana memodelkan penilaian Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan menggunakan metode AHP ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo studi kasus di Kabupaten Gorontalo.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang sistem informasi penilaian cara budidaya ikan yang baik menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP).
3. Kriteria yang digunakan antara lain Lokasi, Suplai air, Tata Letak & Desain, Kebersihan Fasilitas & perlengkapan, Persiapan wadah budidaya, Pengelolaan air, Benih, Pakan, Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologi & Obat Ikan, Penggunaan es & air, Panen, Penanganan Hasil, Pengangkutan, Pembuangan Limbah, Pencatatan, Tindakan Perbaikan, Pelatihan, Kebersihan Personil.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan penilaian Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan menggunakan metode AHP.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk calon penerima sertifikat budidaya perikanan yaitu mendapatkan informasi tentang hal-hal yang belum jelas dalam penentuan sertifikat budidaya perikanan.
2. Untuk pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu mempermudah proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan para calon usaha budidaya ikan yang baik dan merekomendasikan sertifikat untuk kalayakan tempat budidaya perikanan serta waktu pengumpulan data yang diperlukan lebih efisien.
3. Untuk menjaga konsistensi data hasil perhitungan dalam penilaian budidaya perikanan sesuai kriteria yang telah ditentukan.